PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU

Oleh : M. Nowaldi Rama

Email: mohdnowaldirama@gmail.com

Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 -

Telp/Fax. 0761 – 63277

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan dan pengendalian tata kelola kawasan hutan produksi di Provinsi Riau. Adapun yang menjadi latar belakang studi ini adalah a) maraknya alih fungsi kawasan hutan dari kawasan hutan lindung/alam/suaka menjadi kawasan hutan produksi dan perkebunan atau area peruntukan lain (APL), b) munculnya bencana kebakaran dan kabut asap akibat dari beralihnya status kawasan hutan tersebut dan c) meningkatnya praktik ilegal logging dan ilegal trading baik hasil hutan maupun kawasan hutan. Terkait dengan latar belakang itu, studi ini mendasari pemikiran pada kerangka teori kewenangan (authority). Untuk pelacakan informasi dan data-data yang dibutuhkan, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi terhadap data-data baik primer maupun sekunder. Selanjutnya analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan kondisi empirik tentang permasalahan penelitian.

Studi ini pada akhirnya menunjukkan bahwa; pertama, pembinaan dan pengendalian tata kelola hutan produksi di Provinsi Riau mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, dalam upaya melakukan pembinaan dan pengendalian tata kelola hutan produksi itu, Dinas Kehutanan Provinsi Riau melakukan perencanaan tata kelola hutan produksi, pembinaan dan pengendalian usaha produksi kehutanan untuk mendorong restrukturisasi dan rasionalisasi industri kehutanan, membuat rencana dan realisasi pemenuhan bahan baku industri (dalam provinsi/ luar provinsi/ impor), menyusun kerangka kerja pembangunan sektor kehutanan yang meliputi aspek ekologi, sosial, ekonomi dan kelembagaan serta melakukan pengamanan kawasan kehutanan.

Kedua, Terdapat faktor penghambat pembinaan dan pengendalian tata kelola hutan produksi di Provinsi Riau yaitu masalah legalitas hutan negara, masalah pengendalian perizinan, masalah struktur dan kapasitas lembaga serta masalah penguasaan informasi oleh swasta.

Kata Kunci: Tata Kelola, Kewenangan, Hutan Produksi

I. PENDAHULUAN

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial-budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu pemerintah pusat harus segera melakukan pembinaan dan pengendalian kepada masyarakat dan perusahaan yang diberi hak oleh pemerintah untuk mengolah hutan terutama pengusaha hutan tanam industri dalam hal pengelolaan hutan, pengawasan, dan sanksi bagi perusak hutan untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana tata hutan dan

penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

Dalam rangka melaksanakan Pasal 22, Pasal 39, Pasal 66, Pasal 80, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah PP No 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

Hal ini juga berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemerintahan daerah yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menerangkan bahwa kewenangan melaksanakan sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel pembagian urusan pemerintahan dibidang kehutanan di bawah ini :

Tabel 1. Kewenangan Bidang Kehutanan di Provinsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah provinsi
1	2	3	3
1.	Perencanaan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan inventarisasi hutan. b. Penyelenggaraan Pengukuhan kawasan hutan. c. Penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan. d. Penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelolaan hutan. e. Penyelenggaraan rencana kehutanan nasional. 	
2.	Pengelolaan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan tata hutan. b. Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan. 	a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).

		<ul style="list-style-type: none"> c. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. d. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan. e. Penyelenggaraan perlindungan hutan. f. Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan. g. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengantujuankhusus (KHDTK). 	<ul style="list-style-type: none"> b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemanfaatan kawasan hutan; 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; 3) Pemungutan hasil hutan; 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyerapan karbon. d. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara. e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi. f. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu. g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun. h. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.
3.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. b. Penyelenggaraan konservasi tumbuhan dan satwa liar. c. Penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam. d. Penyelenggaraan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota. b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES. c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
4.	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendidikan menengah kehutanan. b. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi. b. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
5.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Penyelenggaraan pengelolaan DAS.	Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
6.	Pengawasan Kehutanan	Penyelenggaraan pengawasan terhadap pengurusan hutan.	

Sumber: Dinas Kehutanan Riau

Dalam pasal 46, menyatakan bahwa Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang kehutanan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh

Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Oleh karena itu kewenangan dalam pembinaan dan pengendalian kawasan hutan di tingkat provinsi dipegang oleh Gubernur Riau selaku Kepala Daerah Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh Dinas

kehutanan selaku unsur pelaksana pemerintah Provinsi Riau dalam bidang kehutanan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.3/Menhut-Ii/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2014 Yang

Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah.

Berikut ini dapat dilihat luas hutan di Propinsi Riau berdasarkan TGHK (SK. Menhut No. 173/Kpts-II):

Tabel 2
Luas Hutan Provinsni Riau Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan /TGHK (SK. Menhut No. 173/Kpts-II)

No.	Peruntukan	Luas (Ha)	(%)
1.	Hutan Lindung	228.794	2,66
2.	Hutan Suka Alam dan Hutan Wisata	531.853	6,19
3.	Hutan Produksi :		
	a. Tetap	1.605.763	18,67
	b. Terbatas	1.815.950	21,12
4.	Hutan produksi yang dapat dikonversi/APL	1.913.136	22,25
5.	Areal Penggunaan Lain (apl) Pelepasan	2.364.828	27,50
6.	Hutan Bakau/Mangrove	138.434	1,61
Jumlah		8.598.757	100

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Riau, 2015

Permasalahan mengenai pembinaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau dalam hal tata kelola kawasan hutan pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau adalah:

1. Kawasan hutan di Provinsi Riau terbagi ke dalam 2 jenis hutan yaitu hutan lindung dan hutan produksi. Jumlah hutan berkurang dari 31.072,36 hektar pada tahun 2013 menjadi 20.202,70 pada tahun 2014 (Badan Pusat Statistik, 2015). Sepanjang tahun 2013-2014 JIKALAHARI mencatat telah terjadi deforestasi sekira 174,027.82 hektare di Kawasan Hutan yang masih memiliki tutupan Hutan Alam. Hal ini akibat industrisasi kehutanan dan perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan luas hutan berkurang akibat alih fungsi lahan, hal ini dapat dilihat pada tabel 2 jumlah luas hutan produksi lebih besar dibanding hutan yang lainnya.

Sebagian kawasan hutan yang lain di Provinsi Riau beralih fungsi menjadi berbagai fungsi seperti kawasan permukiman, perhotelan dan lain-lain. Alih fungsi lahan di Provinsi Riau diberi izin oleh pemerintah untuk memanfaatkan lahan cadangan (lahan resapan air) yang telah dipersiapkan oleh pihak perhutani (Walhi, 2012). Padahal, dalam jangka waktu panjang alih fungsi lahan akan menimbulkan masalah ekologi.

2. Masalah yang timbul akibat maraknya alih fungsi lahan hutan pada wilayah Provinsi Riau diantaranya bencana kabut asap. Kabut asap tebal menyelimuti hampir seluruh wilayah Provinsi Riau pada pertengahan Agustus 2015 lalu. Kabut asap yang menyesakkan itu diakibatkan pembakaran lahan dan hutan dan diperparah kondisi cuaca kering, termasuk pola angin. Kabut asap tidak hanya terjadi pada tahun ini,

tetapi telah menjadi fenomena yang terjadi setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kabut asap dipicu oleh pembakaran yang dilatarbelakangi pemanfaatan hutan dan lahan. Riau sebagai salah satu provinsi di Sumatera menyumbang pencemaran kabut asap terbesar yang menyebar hingga Singapura, daratan utama Malaysia dan Sumatera. "Sebanyak 49.591 jiwa menderita penyakit akibat asap seperti ISPA, pneumonia, asma, iritasi mata, dan kulit," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho. (Republika, 11 September 2015). Asap kebakaran lahan dan hutan di Malaysia juga menyebar ke arah Selat Malaka dan wilayah Riau Pemerintah Provinsi Riau sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi ini. Tetapi, upaya pemadaman dan penanggulangan api serta kabut asap ini tidak bisa dilakukan melalui udara karena ketebalan asap. Sementara di darat, upaya penanggulangan dilakukan dengan cara manual menggunakan mesin damkar di Bengkalis dan Teluk Meranti, termasuk Pelalawan dan Siak.

3. Selain itu, penebangan hutan yang merajalela menjadikan kondisi hutan tersebut rusak dan hilangnya fungsi hutan sebagai pemasok air bagi masyarakat. Belakangan ini kondisi air yang terjadi di Provinsi Riau sangat memprihatinkan dan jauh dari manfaat yang ditimbulkan oleh air itu sendiri, banyaknya pencemaran dan penyalahgunaan berbagai pihak menjadikan Provinsi Riau contohnya di Kabupaten Siak semakin jauh dari sumber air bersih.

Berdasarkan hal tersebut dalam penyusunan pengelolaan kehutanan di Wilayah Provinsi Riau ini diperlukan pengelolaan hutan yang dapat melindungi keberadaan hutan itu sendiri juga memerhatikan kesejahteraan dari masyarakatnya.

Mencermati permasalahan yang terjadi diatas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang berjudul: **"PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN TATA KELOLA KAWASAN HUTAN PRODUKSI DI PROVINSI RIAU"**.

II. Perumusan Masalah

Mencermati permasalahan hutan yang ada di Provinsi Riau sebagaimana yang telah penulis ungkapkan pada latar belakang permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan dan pengendalian tata kelola kawasan hutan produksi di Provinsi Riau?
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam pembinaan dan pengendalian tata kelola kawasan hutan produksi di Provinsi Riau?

III. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui pembinaan dan pengendalian tata kelola kawasan hutan produksi di Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pembinaan dan pengendalian kawasan hutan produksi di Provinsi Riau.

2. Manfaat Penulisan

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna dalam menambah pengetahuan serta masukan bagi aparat pemerintah dalam pembinaan dan pengendalian kawasan hutan di Provinsi Riau.

- b. Diharapkan hasil penulisan ini berguna bagi penulis berikutnya khususnya menyangkut pembinaan dan pengendalian kawasan hutan di Provinsi Riau.

IV. Rujukan Teoritik

Teori Kewenangan

Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing.

Menurut Kaplan (2011:6), kewenangan adalah kekuasaan Formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan ketaatan terhadap peraturan-peraturan". Adapun pengertian kewenangan menurut Budihardjo (2011:7) adalah Kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.

Adapun pengertian kewenangan menurut Tonaer (2009:5) adalah kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.

Berdasarkan uraian definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan berdasarkan peraturan-peraturan yang diharapkan agar peraturan-peraturan tersebut dapat di patuhi. Sehingga kewenangan merupakan ketentuan dalam kekuasaan yang bisa digunakan oleh seorang pemegang kuasa untuk menjalankan roda kepemimpinannya.

V. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penulisan di Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, No. 468, Pekanbaru, 28126. Telp. (0761) 21440 difokuskan ke kawasan hutan di Kabupaten Siak dan Pelalawan dengan alasan karena daerah tersebut memiliki permasalahan tentang alih fungsi lahan, dan dominan memberikan titik panas dan api sehingga sering muncul di pemberitaan media Nasional maupun lokal serta memiliki kawasan hutan produksi yang luas.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang penulis peroleh langsung dari hasil penulisan lapangan, berupa hasil wawancara penulis dengan responden serta hasil observasi (pengamatan) penulis sendiri.
- b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penulisan ini

3. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini diperoleh dari informan, peraturan perundang-undangan, laporan, makalah dan jurnal.

4. Teknik pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah:

- a. Wawancara.
- b. Observasi.
- c. Dokumentasi.

Tabel 3
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau	Zulkifli Yusuf, SH
2.	Kasi Sub Bagian Bina Program	Saidi, S.Hut
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala	Beni Masfar, SE, MM
4.	Seksi Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Riau	Embiyarman, S.Hut, MP
5.	Kepala Desa Dayun Kecamatan Dayun Siak	Nasya Nugrik, S.Ip
6.	GM. SosGov. RAPP	H. Herman Gazali, SE, MBA
7.	Aktivis LSM JIKAHALARI	Aiden Yusti, M.Pd
8.	Aktivis WALHI Riau	Made Ali, SH
	Jumlah	

Sumber Data : Data Olahan Tahun 2016

5. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif yang membandingkan data yang ada dengan berbagai teori yang mendukung dan bersifat menjelaskan atau menguraikan.

VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembinaan dan Pengendalian Tata Kelola Kawasan Hutan Produksi

Sejak awal era pembangunan Indonesia, sumber daya hutan Riau telah menjadi salah satu modal utama untuk pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan pembangunan pada masa lalu telah menyebabkan timbulnya berbagai

permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari segi sumber daya, telah terjadi *degradasi* dan *deforestasi* yang antara lain disebabkan oleh : pemanfaatan hutan yang tidak terkendali, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar untuk berbagai keperluan pembangunan, illegal logging, perambahan, okupasi lahan dan kebakaran hutan. Selama sepuluh tahun terakhir, laju deforestasi di Indonesia telah mencapai rata-rata 1,6 juta hektar pertahun. Dari segi sosial ekonomi masyarakat lokal, dampak pembangunan kehutanan terhadap peningkatan kesejahteraan tidak cukup nyata akibat adanya proses *marginalisasi* masyarakat sekitar hutan yang nampak dari kesenjangan dan kemiskinan. Pembangunan Kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan tidak mungkin tercapai, apabila

paradigma lama masih dijadikan acuan. Oleh karena itu diperlukan perubahan paradigma secara mendasar. Paradigma baru pembangunan kehutanan adalah : pergeseran orientasi dari pengelolaan kayu (*timber management*) menjadi pengelolaan sumber daya (*resources-based management*), pengelolaan yang sentralistik menjadi desentralistik serta pengelolaan sumberdaya yang berkeadilan.

Berdasarkan hal itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau adalah melakukan pembinaan dan pengendalian tata kelola kawasan hutan industri. Adapun pembinaan dan pengendalian kawasan hutan produksi ditingkat dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah provinsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.3/Menhut-Ii/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2014 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah.

Dinas Kehutanan Provinsi Riau dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan itu menyusun visi dan misi Dinas Kehutanan yang selaras dengan visi dan misi Provinsi Riau. Berikut visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

1. Visi Pembangunan Kehutanan

Visi Pembangunan Kehutanan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya kelestarian fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan guna mendukung kesejahteraan rakyat menuju Visi Riau 2020”.

Penetapan Visi Dinas Kehutanan Provinsi Riau dilandasi :

- ❑ Bahwa kelestarian hutan menjadi prinsip bagi penyelenggaraan pembangunan kehutanan serta

pengurusan hutan, hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diacu secara global, yaitu “*Sustainable Forest Development*”.

- ❑ Bahwa keberadaan hutan yang terjaga kelestariannya mutlak harus ada karena merupakan salah satu sistem penyangga kehidupan.
- ❑ Bahwa kesejahteraan masyarakat harus diwujudkan, karena faktor kesejahteraan sangat berkaitan mutlak dengan eksistensi hutan.

2. Misi Pembangunan Kehutanan

Dalam rangka mencapai visi untuk kurun waktu jangka menengah, ditetapkan misi sebagai berikut :

a. Menjamin Keberadaan Hutan

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum/ status kawasan hutan serta mempertahankan hutan sesuai dengan fungsinya (konservasi, lindung, pengelolaan kawasan hutan untuk pencapaian kelestarian hutan produksi). Terjaminnya keberadaan kawasan hutan akan mendukung.

b. Mengoptimalkan Manfaat Hutan

Misi ini bertujuan untuk:

- 1) Memulihkan kondisi hutan yang telah rusak.
- 2) Meningkatkan manfaat sosial hutan.
- 3) Meningkatkan upaya konservasi Sumber Daya Hutan.
- 4) Mengoptimalkan manfaat hasil hutan (kayu, non kayu, wisata, jasa lingkungan), pada kawasan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi serta hutan diluar kawasan hutan.

c. Memperkuat Kelembagaan.

Misi ini bertujuan untuk memperkuat landasan serta dukungan bagi pencapaian misi menjamin keberadaan hutan dan mengoptimalkan

manfaat hutan. Penguatan ini meliputi : profesionalisme organisasi dan SDM Dinas Kehutanan, IPTEK, perencanaan dan peraturan perundangan kehutanan, membangun kemitraan/kerjasama dengan stakeholders, penyiapan data/informasi, pengawasan/pengendalian.

1. Pembinaan dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi

Dinas Kehutanan Provinsi Riau dalam upaya melakukan pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Riau telah merumuskan berbagai kebijakan di sektor kehutanan yaitu kebijakan pembinaan dan pengendalian dari sektor perencanaan pengelolaan hutan produksi. Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- 1) Mengawasi pemanfaatan hutan produksi baik untuk sector kehutanan maupun untuk penggunaan di luar sector kehutanan,
- 2) Fasilitasi kelembagaan dan percepatan operasional KPHP
- 3) Penyiapan areal dan unit kelola usaha pemanfaatan hasilhutan kayu hutan alam dan hutan tanaman, hasil hutanbukankayu/RE/Jasling.

Teknis Pelaksanaan Kegiatan pembinaan dan pengendalian perencanaan pengelolaan hutan produksi dapat berupa koordinasi,

konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, identifikasi, sosialisasi, dan monitoring. Metode Pelaksanaan Kegiatan pembinaan dan pengendalian perencanaan pengelolaan hutan produksi dapat dilakukan dengan Sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Ruang Lingkup Kegiatan meliputi:

1. Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
2. Penyiapan areal dan unit kelola UPHHK HA/HT;
3. Perumusah Draft Regulasi Kebijakan Kelembagaan Pembangunan KPH
4. Sosialisasi KPH;
5. Identifikasi sebaran potensi HHBK;
6. Fasilitasi Kelembagaan KPHP;
7. Monitoring dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi pada KPH;
8. Identifikasi Potensi Pengembangan Unit-unit Usaha Pemanfaatan untuk KPH;
9. Inventarisasi dan Penataan Hutan Produksi pada KPH.

Luas Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), setelah diupdate pada tahun 2012, menurut Fungsi Kawasan Hutan:

Tabel 4
Luas Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)

NO	FUNGSI KAWASAN HUTAN	LUAS (Ha)	%
A	KAWASAN HUTAN		
1	HUTAN LINDUNG (HL)	208.910,00	2,31
2	KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)	1.638.519,00	18,13
3	KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)	2.952.179,00	32,67
4	HUTAN SUAKA ALAM / HUTAN PELESTARIAN ALAM	628.636,00	6,96
5	HUTAN MANGROVE / BAKAU	-	-
B	KAWASAN NON KEHUTANAN		
1	PERAIRAN	119.260,00	1,32
2	AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL)	1.719.364,73	19,03
3	HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT Dikonversi (HPK)	1.769.966,27	19,59
JUMLAH		9.036.835,00	100,00

Sumber : Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa kawasan hutan di Provinsi Riau berjumlah 9.036.835Ha (Sembilan Juta Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima hektar) yang dibagi ke dalam kawasan hutan dan kawasan non kehutanan. Kawasan hutan itu meliputi; hutan lindung (HL), hutan produksi tetap (HP), hutan produksi terbatas (HPT), hutan suaka alam/pelestarian alam dan hutan mangrove/bakau. Sedangkan kawasan non kehutanan meliputi; kawasan perairan, areal penggunaan lain (APL) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

2. Pembinaan dan Pengendalian Usaha Industri Kehutanan

Maksud pembinaan dan pengendalian usaha industri kehutanan adalah untuk mendorong restrukturisasi dan rasionalisasi industri kehutanan yang berorientasi pada ketersediaan bahan baku, peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku, produk yang bernilai tinggi dan pemasaran yang kompetitif dan mampu bersaing di pasar global.

Tujuan dari pembinaan dan pengendalian usaha industri kehutanan adalah:

1. Pembinaan dan pengendalian industri primer kehutanan;
2. Pembinaan dan pengendalian peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku oleh industri kehutanan;
3. Pembinaan dan pengendalian peningkatan kinerja industri kehutanan melalui fasilitasi verifikasi ilegalitas kayu pada industri kehutanan.

Teknis Pelaksanaan Kegiatan pembinaan dan pengendalian usaha industri kehutanan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pemantauan,

fasilitasi, dan sosialisasi. Metode Pelaksanaan Kegiatan pembinaan dan pengendalian usaha industri kehutanan dapat dilakukan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Ruang Lingkup Kegiatan meliputi:

1. Monev, Pembinaan dan Pengendalian Bahan Baku dan Produk Industri Hasil Hutan;
2. Monev dan Pembinaan Kinerja Industri Primer Hasil Hutan;
3. Pemantauan dan Evaluasi Pemasaran Hasil Hutan;
4. Fasilitasi Perizinan IUIPHHK;
5. Restrukturisasi/Revitalisasi IUIPHHK (Pemolaan Industri Primer Hasil Hutan);
6. Sosialisasi SVLK/Kebijakan Pasokan Bahan Baku;
7. Monitoring Potensi Bahan Baku Kayu Lahan Masyarakat/Perkebunan.

3. Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri (Dalam Provinsi/ Luar Provinsi/ Impor)

Dalam rangka memberikan gambaran riil pemenuhan bahan baku terhadap kebutuhan bahan baku industri per kabupaten/ kota dilakukan rekapitulasi kebutuhan bahan baku dan asal bahan bakunya. Diperoleh informasi bahwa kebutuhan bahan baku IPHHK terbesar berada di Pelalawan dan Siak. Hal ini disebabkan oleh adanya 2 (dua) Industri *Pulp and Paper* yang berada pada 2 (dua) kabupaten tersebut. Suplai bahan baku kedua industri tersebut berasal dari hutan tanaman dan hutan rakyat/ hutan hak

yang tersebar pada hampir seluruh kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Riau baik yang terkait dengan management kedua perusahaan melalui mekanisme KSO (kerjasama operasional) maupun yang sifatnya non-KSO. Namun dalam pelaksanaannya kedua industri tersebut masih mendatangkan dari luar Provinsi Riau seperti dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan tanaman yang ada belum mencukupi secara teknis (umur tanaman) untuk dapat memenuhi bahan baku kedua industri tersebut setiap tahun.

Sementara pada beberapa kabupaten/ kota yang lain, kebutuhan bahan baku industri relatif sedikit bahkan terdapat beberapa kabupaten/ kota dimana IPHHK tidak melaksanakan kegiatannya. Industri yang tidak melaksanakan kegiatannya secara umum disebabkan oleh keterbatasan atau tidak memperoleh kontrak suplai bahan baku ataupun preferensi pemilik industri untuk tidak melaksanakan kegiatannya. Beberapa

IPHHK pada beberapa kabupaten/ kota khususnya selain yang berada di Pelalawan dan Siak, pemenuhan bahan bakunya berasal dari hutan rakyat/ hutan hak ataupun dari perkebunan baik yang berasal dari Riau seperti Siak, Rokan Hilir dan Kuantan Singingi maupun luar provinsi seperti Jambi dan Sumatera Barat.

Sementara itu berdasarkan jumlahnya secara keseluruhan, realisasi suplai bahan bakunya dari dalam provinsi dan luar provinsi relatif sama. Untuk Tahun 2015, terdapat bahan baku impor (dari Malaysia) guna pemenuhan bahan baku pada IPHHK PT. Riau Andala Pulp and Paper, berdasarkan informasi dari pihak perusahaan pemenuhan bahan baku tersebut dilaksanakan sebagai alternatif sumber bahan baku karena pertimbangan harga yang kompetitif. Profil kebutuhan bahan baku dan realisasi pemenuhan bahan baku berdasarkan asalnya dapat diperiksa pada tabel berikut:

Tabel 5
Kapasitas Bahan Baku IPHHK Dibandingkan Dengan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri

No.	Kabupaten / Kota	Kebutuhan Bahan Baku Berdasarkan Kapasitas Iphhk (M3/Tahun)	Realisasi Pemenuhan Bahan Baku (M3)	Asal Bahan Baku		
				Dalam Propinsi	Luar Propinsi	Impor
1.	Pekanbaru	327,640	94,414.61	19,325.28	75,089.33	-
2.	Dumai	12,400	-	-	-	-
3.	Kampar	81,400	44,054.21	44,054.21	-	-
4.	Pelalawan	25,938,000	3,197,005.55	146,913.66	3,014,731.02	35,360.87
5.	Siak	29,074,564	11,073,151.84	7,890,922.89	3,182,228.95	-
6.	Indragiri Hulu	11,600	-	-	-	-
7.	Indragiri Hilir	92,200	-	-	-	-
8.	Rokan Hulu	66,800	-	-	-	-
9.	Rokan Hilir	141,800	30,511.99	18,256.55	12,255.44	-
10.	Bengkalis	31,800	-	-	-	-
11.	Kuantan Singingi	72,040	-	-	-	-

12.	Kep. Meranti	110,000	-	-	-	-
	Jumlah	55,960,244	14,439,138.20	8,119,472.59	6,284,304.74	35,360.87

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2015

4. Penyusunan Kerangka Kerja Pembangunan Kehutanan

Dengan memperhatikan kondisi sumber daya hutan saat ini, maka kebijakan pengelolaan sumber daya hutan ditujukan kepada upaya:

- a. Mengelola sumber daya hutan secara optimal melalui sistem pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan daya dukungnya;
- b. Menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari kerusakan sumber daya hutan;
- c. Mendelegasikan kewenangan dan tanggungjawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya hutan secara bertahap;
- d. memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- e. meninjau dan menyempurnakan system pengelolaan hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi dengan indikator-indikator keberhasilan yang jelas;
- f. memelihara kawasan konservasi untuk berbagai keperluan; serta
- g. mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan kerusakan sumber daya hutan.

5. Pengamanan Kawasan Hutan

Selain point-point sebagaimana diuraikan di atas, kegiatan pembinaan dan pengendalian tata kelola hutan produksi juga tidak lepas dari kegiatan pengamanan kawasan hutan.

Berdasarkan penelusuran dokumen-dokumen terkait dengan pengamanan kawasan hutan itu, berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau dalam menjaga dan mengamankan sektor kehutanan sebagai tanggungjawab kesinambungan kawasan hutan di Provinsi Riau.

a) Kegiatan Preventif

Kegiatan preventif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Kegiatan preventif yang telah dilakukan dalam upaya pengamanan hutan, antara lain:

- a. Patroli di dalam kawasan hutan.
- b. Penjagaan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya.
- c. Identifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman.

b) Kegiatan Represif

Kegiatan preventif merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

Kegiatan preventif yang telah dilakukan dalam upaya pengamanan hutan, antara lain:

1. Operasi penegakan hukum;
2. Pengumpulan bahan keterangan;
3. Pengamanan barang bukti;
4. Penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan;
5. Penanggulangan konflik satwa liar;
6. Pemadaman kebakaran; dan
7. Pengawasan tersangka, saksi atau barang bukti.

B. Faktor Penghambat Pembinaan dan Pengendalian Tata Kelola Hutan Produksi

Setidaknya terdapat empat praktik tata kelola pemerintahan di lapangan yang secara signifikan menghambat pembinaan dan pengendalian tata kelola kawasan hutan produksi sebagaimana yang diuraikan berikut ini.

1. Masalah Legalitas Hutan Negara

Status legal kawasan hutan negara yang ditempuh melalui proses pengukuhan kawasan hutan oleh Panitia Tata Batas (PTB) secara umum hanya Berita Acara Tata Batas (BATB) yang ditandatangani panitia itu. Namun adanya klaim terhadap hutan negara tidak terselesaikan. Akibatnya hutan negara yang sudah legal menjadi tidak *legitimate*. Dalam artian tidak diakui keabsahan legalitasnya oleh banyak pihak. Penyebab lain yaitu ukuran kinerja PTB berdasarkan panjang batas (km) dan dibatasi waktu kerjanya hanya satu tahun.

2. Lemahnya pengendalian izin.

Perizinan pada dasarnya adalah suatu proses untuk dapat melakukan tindakan tertentu terhadap hal yang dilarang. Namun dengan izin, beberapa hal yang dilarang itu justru menjadi sah dilakukan. Substansi izin adalah pengendalian yang harus dilakukan

untuk tujuan sosial, lingkungan, ekonomi secara adil, oleh pihak yang berwenang atau pihak pemberi izin. Namun, dalam kenyataannya seringkali ditemukan tidak demikian. Kajian KPK (2013) menunjukkan, di dalam seluruh mata rantai perizinan kehutanan mulai dari pengurusan izin, perencanaan hutan, pelaksanaan produksi, tata niaga hasil hutan, serta pengawasan dan pengendalian perizinan, terdapat biaya suap/ peras.

3. Struktur dan Kapasitas Lembaga

Struktur organisasi, baik pusat maupun daerah, cenderung tidak mempunyai tugas dan kapasitas untuk sampai pada penguasaan SDA di lapangan. Pada umumnya pelayanan perizinan yang dikedepankan adalah bagi usaha besar. Secara umum juga dijumpai masalah masih rendahnya kapasitas lembaga dalam menggunakan izin sebagai instrumen pengendalian. Kajian *review* perizinan oleh UKP4 yang dilakukan di sembilan kabupaten di tiga provinsi yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Jambi yang saat ini masih sedang berjalan, menunjukkan dokumen perizinan sebagai instrumen pengendalian izin dan jumlah produksinya yang dimiliki oleh pejabat pemberi izin kurang dari 50%. Dokumen yang tidak dipunyai itu termasuk NPWP perusahaan. Kondisi demikian mencerminkan lemahnya Pemerintah/ Pemda mengetahui besarnya kekayaan negara, tidak peduli terhadap kecilnya jumlah pendapatan negara serta nilai kerugian yang diakibatkan oleh sistem perizinan yang sedang berjalan. Dalam kondisi seperti itu, alih fungsi dan perusakan hutan bukanlah bagian penting dari ke pemerintahan yang ada.

4. Penguasaan Informasi Oleh Swasta

Kebijakan dan skema perizinan secara umum mengharuskan para calon

pemegang izin-hutan, tambang, kebun-mencari sendiri calon lokasi izin di dalam wilayah yang telah dialokasikan Pemerintah. Pemerintah/Pemda memang melakukan verifikasi ketepatan lokasi izin tersebut. Namun praktiknya informasi yang digunakan sangat terbatas. Akibatnya, hampir setiap lokasi izin masih terdapat konflik penggunaan atau pemanfaatan hutan oleh pihak lain, termasuk adanya pemukiman, kebun dan lahan garapan masyarakat adat/lokal.

VII. PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Pembinaan dan pengendalian tata kelola hutan produksi di Provinsi Riau dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, dalam upaya melakukan pembinaan dan pengendalian tata kelola hutan produksi itu, Dinas Kehutanan Provinsi Riau melakukan perencanaan tata kelola hutan produksi, pembinaan dan pengendalian usaha produksi kehutanan untuk mendorong restrukturisasi dan rasionalisasi industri kehutanan, membuat rencana dan realisasi pemenuhan bahan baku industri (dalam provinsi/ luar provinsi/ impor), menyusun kerangka kerja pembangunan sektor kehutanan yang meliputi aspek ekologi, sosial, ekonomi dan kelembagaan serta melakukan pengamanan kawasan kehutanan.
2. Terdapat faktor penghambat pembinaan dan pengendalian tata

kelola hutan produksi di Provinsi Riau yaitu masalah legalitas hutan negara, masalah pengendalian perizinan, masalah struktur dan kapasitas lembaga serta masalah penguasaan informasi oleh swasta.

DAFTAR RUJUKAN

Buku-buku :

- Alam, Setia Zain, 2008. *Ekologi Hutan*. Bumi Aksara Jakarta.
- Arief, Ridwan. 2011. *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat*, Rineka Cipta, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi, 2012. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung:PT Tarsito.
- Budihardjo. 2011. *Sistem Birokrasi Pemerintah*. Jakarta:CV Mas Agung.
- Elvida YS dan Sylviani (2010) dengan judul *Peran dan Koordinasi Para Pihak Dalam Pengelolaan KPH*, Dinas Kehutanan Sumatera Selatan.
- FWI/GFW. 2001. *Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor , Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch
- Guritno. 2008. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Gadjah Mada University Press.
- Hidayat, Herman.2005. *Politik Lingkungan: Pengelolaah Hutan Masa Orde Baru Dan Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

J. Pierce, Carol Colfer dan Capistrano, Doris.2006. Politik Desentralisasi Hutan, Kekuasaan dan Rakyat: *Pengalaman di berbagai Negara*. Jakarta: Inti Prima Karya.

JIKAHALARI.2016. 14 Tahun Melawan Monopoli Penguasa Hutan dan Lahan Catatan Hitam Tata Kelola Hutan dan Lahan di Riau sejak 2002 hingga 2016. Ebook : www.jikahalari.com

Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.

Tonaer, Budi. 2009. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Yusuf, Abdul Muis dan Mohamad Taufik Makarawo, 2011, *Peran Dinas Kehutanan Dalam Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat Di Kabupaten Lampung Barat*. Jurnal

Undang-Undang dan Peraturan :

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 Tahun 2006.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.3/Menhut-Ii/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2014 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah